

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan cara penyampaian informasi yang dikenal dengan istilah teknologi informasi sudah ada sejak zaman dahulu. Mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakkan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet pada tahun 1990an hingga sekarang. Pada tahun 1940 saat perang dunia ke 2 sistem informasi digunakan oleh militer untuk pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen yang disimpan dalam bentuk *magnetic tape*. Pada tahun 1946 dikembangkan komputer digital pertama. Pada tahun 1957 Amerika membentuk *Advance Research Projects Agency* untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Seiring berkembangnya teknologi informasi perusahaan atau organisasi banyak membutuhkan informasi dengan cepat dan akurat dalam mengembangkan kinerjanya. Informasi yang dibutuhkan berupa informasi penjualan, pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan akuntansi. Untuk mengetahui semua informasi yang ada di perusahaan atau organisasi diperlukan sistem yang dapat menjalankan prosedur-prosedur yang telah diterapkan untuk tujuan tertentu.

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2009).

Sistem informasi yang sangat umum ditemukan terdapat pada sebuah perusahaan atau organisasi diantaranya sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan.

Sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi saat ini yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah awalnya berbasis kas atau CTA (*Cash Toward Accrual*) yaitu teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Sedangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah saat ini sesuai PP 71 tentang SAP berbasis akrual yaitu tidak hanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas, tapi juga mencatat jumlah utang dan piutang.

Perusahaan atau organisasi membutuhkan sistem informasi agar dapat memproses keuangan dengan cepat, tepat dan relevan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan (Mulyanto, 2009). Secara umum sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Sistem informasi keuangan bagian dari

sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan.

Pada era persaingan global dan kompetisi yang semakin ketat, setiap perusahaan harus mampu melakukan inovasi dalam perkembangan sistem informasi keuangan agar efektifitas dan tujuan perusahaan serta daya saing perusahaan dapat terbangun dengan baik. Dalam membangun teknologi dan sistem informasi, perusahaan memerlukan perubahan yang terus menerus dan berkelanjutan. Teknologi dan sistem informasi keuangan tersebut akan membantu perusahaan dalam mengolah keuangan dengan baik. Untuk perusahaan besar biasanya memiliki staf internal auditors yang bertanggungjawab terhadap perawatan integritas sistem keuangan perusahaan. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut *EDP auditors*. Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini juga dilengkapi *financial intelligence* subsistem, yang mengumpulkan informasi dari lingkungan.

Berbeda dengan perusahaan, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh

masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data atau informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah yang disebut dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data atau informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Karena tata usaha merupakan bagian yang penting di organisasi kantor demi menunjang kelancaran dan terpenuhinya tujuan kantor (Gie, 2007). Misalnya saja peran tata usaha adalah menyediakan informasi keuangan bagi perusahaan. Serta salah satu manfaat adanya tata usaha kantor adalah kelancaran pekerjaan kantor dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan.

Dengan latar belakang seperti diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk laporan dengan judul : **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) GUNA Mendukung Penatausahaan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam suatu kantor atau perusahaan harus ada sistem informasi dalam mendukung proses penatausahaan keuangan, begitu juga pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi salah satunya bersumber dari pelaksanaan sistem informasi dalam mendukung proses penatausahaan itu sendiri. Oleh karena itu penulis mengemukakan perumusan masalah yaitu bagaimana penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendukung penatausahaan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.3 Tujuan Magang**

Kegiatan magang merupakan suatu bentuk praktek kerja yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman diberbagai bidang pada suatu instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya magang di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendukung penatausahaan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.4 Manfaat Magang**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil kerja praktek ini, adalah :

### **I. Manfaat Praktis:**

Manfaat praktis dari laporan kerja praktek ini adalah adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kantor atau organisasi, kantor akan

mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek lapangan, dan adanya orang yang mengaudit kantor tanpa mengeluarkan biaya dengan adanya laporan-laporan magang yang diberikan kepada kantor.

## **II. Manfaat Teoritis:**

Manfaat teoritis dari laporan kerja praktek ini adalah dapat menambah bahan baca bagi pembaca serta dapat mengetahui penerapan sistem informasi dalam mendukung proses penatausahaan.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Adapun tempat yang sesuai dengan latar belakang dan masalah yang akan dibahas adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja praktek lapangan magang.

Waktu pelaksanaan kuliah praktek/magang akan berlangsung selama 40 hari yang terhitung dari tanggal 2 januari 2017 sampai 24 februari 2017.

### **1.6 Sistematika Penulis**

Agar dapat memperoleh laporan ini maka penulis menyusun sistematika, sebagai berikut :

## **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan bab secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, sistematika penulisan.

## **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian sistem informasi, perangkat sistem informasi, komponen sistem informasi, fungsi sistem informasi, pengertian sistem informasi keuangan, fungsi sistem informasi keuangan, tujuan sistem informasi keuangan, pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian penatausahaan, kegiatan tata usaha, peranan tata usaha, pengertian badan pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengelolaan keuangan.

## **BAB III : Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Gambaran umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berisikan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, bentuk kegiatan atau aktivitas kantor, serta penatausahaan keuangan di bidang perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB IV : Pembahasan**

Bab ini berisikan laporan magang yang telah dilakukan selama kegiatan magang berlangsung.

## **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, serta saran-saran penulis berikan agar dapat bermanfaat bagi kantor maupun penulis.